

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Umum

Implementasi program *food estate* di Indonesia ditandai dengan kontradiksi antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, pemerintah mengklaim program ini sebagai solusi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 sekaligus upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, implementasinya justru menghasilkan kegagalan produktivitas, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi petani lokal serta masyarakat adat, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh Kemenhan, militer, dan korporasi yang memperoleh akses luas atas lahan dan sumber daya alam.

Kontradiksi ini dapat dijelaskan dengan menganalisis program tersebut dari perspektif realisme kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli. Pertama, konsep pemisahan politik dan moralitas menurut Machiavelli menjelaskan bahwa pengabaian pertimbangan moral dalam program *food estate*, seperti keadilan terhadap warga negara, keadilan ekologis, dan kemanusiaan terjadi karena tujuan program ini bukan untuk mencapai ketahanan pangan dan mengatasi ancaman krisis pangan, melainkan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Hal ini karena, dari perspektif Machiavelli, pengabaian pertimbangan moral hanya dapat dilakukan demi keselamatan negara, yang juga identik dengan keberlangsungan kekuasaan penguasa negara.

Kedua, konsep hukum dan militer menurut Machiavelli menjelaskan bahwa kekuasaan dalam program *food estate* dipertahankan dan diperluas melalui penyederhanaan aturan perlindungan lingkungan dan partisipasi publik serta penggunaan kekuatan militer. Dari perspektif Machiavelli, hukum dan militer adalah dua sisi dari satu kekuasaan yang sama yang digunakan terutama untuk melanggengkan kekuasaan. Ketiga, konsep *virtu* dan *fortuna*, menurut Machiavelli, menjelaskan penggunaan krisis pandemi Covid-19 untuk menjustifikasi penyederhanaan hukum dan pelibatan militer dalam program *food estate*.

Berdasarkan analisis dari perspektif realisme kekuasaan menurut Machavelli, dapat disimpulkan bahwa program *food estate* dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan logika pembangunan untuk mencapai ketahanan pangan dan mengatasi ancaman krisis pangan sebagaimana diklaim pemerintah. Melalui program *food estate*, negara mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan cara menjadikan program ini sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan kekuasaan kepada elite politik dan ekonomi yang menyokong kekuasaan rezim. Karenanya, pertimbangan moral diabaikan, hukum dan militer digunakan sebagai instrumen kekuasaan, dan pandemi dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan negara yang memarginalkan masyarakat adat dan petani lokal serta merusak lingkungan dalam program *food estate*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal bagi pemangku kebijakan dan akademisi.

5.2.1 Rekomendasi bagi Pemangku Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program *food estate*. Evaluasi ini harus membuka ruang partisipasi yang bermakna dan melibatkan secara aktif pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh dampak negatif dari program ini terutama masyarakat adat dan petani lokal serta masyarakat sipil pada umumnya. Prinsip *Leave No One Behind* dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diadopsi pemerintah dalam kebijakan pembangunannya perlu diwujudkan pertama-tama dengan menempatkan pihak yang paling rentan dalam pembangunan seperti masyarakat adat dan petani lokal sebagai subjek yang suara dan partisipasinya perlu didengar dan dilibatkan dalam program pembangunan termasuk juga *food estate*. Pengetahuan, tradisi, dan budaya yang mereka hidupi dan telah terbukti membuat mereka mencapai ketahanan pangan secara lokal tidak boleh diabaikan, tetapi harus diadaptasikan pemerintah sesuai dengan kondisi tiap daerah. Karena itu, program untuk mencapai ketahanan pangan seharusnya tidak diseragamkan seperti dalam program *food estate*, tetapi

disesuaikan dengan cara bertani, pengetahuan, tradisi, dan budaya yang berkembang dan dihidupi masyarakat di setiap daerah di Indonesia.

Kedua, instrumen perlindungan lingkungan yang dilucuti melalui produk-produk hukum seperti UU Cipta Kerja dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 perlu dipulihkan. Hal ini karena ketahanan pangan jangka panjang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan hutan sebagai basis produksi pangan itu sendiri. Sebaliknya, penyederhanaan aturan hukum untuk perlindungan lingkungan hanya akan menciptakan krisis iklim dan kerentanan pangan, sebagaimana ditunjukkan dalam program *food estate*.

Ketiga, penggunaan militer dalam program *food estate* perlu dihentikan. Hal ini karena keterlibatan militer dalam program *food estate* menunjukkan adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat dan petani lokal. Di samping itu, keterlibatan militer dalam program pertanian juga mengaburkan batas antara fungsi militer untuk mempertahankan negara dengan kepentingan politik dan ekonomi elite tertentu karena militer sebagaimana ditunjukkan dalam program *food estate* sering kali bertindak dalam pengamanan perampasan tanah dan hutan adat oleh korporasi. Keterlibatan militer dalam program pertanian tentu tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Keterlibatan militer justru berpotensi memperpanjang catatan kekerasan terhadap masyarakat dalam proyek-proyek sipil.

Keempat, pemerintah perlu mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat terutama hak atas lahan dan hutan adat. Hal ini karena sebagaimana ditunjukkan dalam program *food estate*, lahan dan hutan adat sering dilihat pemerintah sebagai lahan kosong yang bisa dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Padahal dalam perspektif masyarakat adat itu sendiri, hutan adalah ruang hidup di mana semua aspek kehidupan dan identitas budaya mereka bergantung. Karena itu, menghancurkan hutan adat dengan deforestasi dan alih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan sama artinya dengan menceraabut masyarakat adat dari kehidupan dan identitas mereka sendiri.

5.2.2 Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya

Pertama, penelitian ini menggunakan pemikiran realisme kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli sebagai kerangka analisis tunggal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperkaya analisis program *food estate* dengan menggunakan kerangka teori lain sebagai pembanding. Penelitian selanjutnya, misalnya, dapat menggunakan teori kekuasaan Michael Foucault untuk membaca dinamika kekuasaan dan wacana yang digunakan dalam program *food estate*.

Kedua, penelitian ini berfokus pada program pembangunan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajiannya pada bidang atau program pembangunan lain yang dijalankan pemerintah, seperti pertambangan untuk melihat apakah pada program pembangunan lain selain pertanian, logika pembangunan yang dijalankan pemerintah sesuai dengan yang diklaim pemerintah atau tidak.

Ketiga, penelitian ini bertumpu pada sumber-sumber sekunder berupa laporan lembaga, jurnal akademis, dan investigasi jurnalistik. Penelitian selanjutnya yang menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak, pejabat pemerintah, dan korporasi terkait program *food estate* serta observasi langsung pada lokasi *food estate* dapat memperkuat validitas empiris dari temuan yang dihasilkan dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulgani, Fuad et al. *Food Estate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara)*. Jakarta: FIAN Indonesia, 2022.
- Arif, Ahmad. *Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020.
- Chao, Sophie. *In The Shadows of Palms: More Than Human Becomings in West Papua*. Durham and London: Duke University Press, 2022.
- Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. *Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate*. Jakarta: KLHK, 2020.
- Franky, Y.L. *Mega Proyek MIFEE: Suku Marind Anim dan Pelanggaran HAM*. Jakarta: ELSAM, 2014.
- Greenpeace Indonesia. *Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022.
- Habtom, Gabrielle. *Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut Mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial*. Geneva: Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial Divisi Perjanjian HAM (HRTD), 2013.
- Houterman, J. dan H.P. Ritzema. *Land and water management in the Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan*. Jakarta: Government of Indonesia and Royal Netherlands Embassy, 2009.
- Machiavelli, Niccolo. *Diskursus*. Terj. Yudi Santoso dan Sovia VP. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.

- , *Sang Penguasa*. Terj. C. Woekirsari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mietzner, Marcus. *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Washington, D.C.: East-West Center Washington, 2006.
- Pantau Gambut. *Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi*. Jakarta: Pantau Gambut, 2021.
- Peters, B. Guy. *The Politics of Bureaucracy*, 5th ed. London: Routledge, 2001.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Machiavelli*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Raynaldo G., dkk. *Indonesia Environmental Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL, 2021.
- Skinner, Quentin. *The Foundations of Modern Political Thought*, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- TAPOL and AwasMIFEE. *Pandemic Power-grabs: Who Benefits from Food estate in West Papua?* London: TAPOL, 2022.
- , *The Military's Role in Food Estate Plans*. London: TAPOL, 2022.
- Thariq, Ahmad. "Menguak Rencana Food estate di Merauke: dari Militerisasi Hingga Penggusuran Masyarakat Adat", dalam *Gaung AMAN, Di Bawah Sepatu Lars: Ancaman Ruang Hidup Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN, April-Juni 2025.
- UN Environment. *Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation*. Nairobi: UN Environment, 2018.
- Walhi Kalteng. *Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Walhi Kalteng, 2021.
- Walhi. *Food Estate Papua: Perampasan Tanah Berkedok Ketahanan Pangan*. Jakarta: Walhi, 2021.

Jurnal dan Skripsi

- Adha, Rifki et al. "Implementation Of The Food estate Of The Government Of The Republic Of Indonesia In Riaria Village, Humbang Hasundutan Regency." *International Journal of Cultural and Social Science*, 6:3, 2025.
- Asrawijaya, Enkin. "Traditional Ecological Wisdom for the Resilience of Indigenous Peoples in Indonesia." *Jurnal Besari*, 1:2, 2024.
- Banusu, Mathias. "Penerapan Teori Kekuasaan Machiavelli dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia." *Skripsi. IFTK Ledalero*. Ledalero, 2021.
- Izzati, Amrina Nur, Beatriks Liku Gustiawati, dan Rizal Yoga Saputra. "Proyek Food Estate pada Lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau Tidak?" *Ecoprofit: Sustainable and Environment Business Journal*, 1:1, Juli 2023.
- Maulana, MRP, H Herawati, dan K Kartini. "Pengelolaan Lahan Gambut Secara Partisipatif Studi Kasus Desa Wajok Hilir." *JeLAST: Jurnal Teknik, Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 8:1, Februari 2021.
- Nusantara, Rossie W. at all. "Impact of Land-Use Change on Soil Carbon Dynamics in Tropical Peatland, West Kalimantan – Indonesia." *Indonesian Journal of Geography*, 54:1, 2020.
- Pecamuya, Robertus. "Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4:1, 2025.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, Sugiasih, dan Sutaryono. "Membandingkan Keberhasilan Pengembangan Food Estate Berbasis Reforma Agraria di Desa Karangwangi, Mekarmukti dan Desa Sukawargi, Cisarupan, Kabupaten Garut." *Jurnal Ganaya*, 7:4, 2024.
- Ramadhan, Iqbal Yanuar. "Sekuritisasi dalam Kebijakan Food Estate di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional*, 2:3, Desember 2023.
- Sari, Almonika Cindy Fatika. "Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa

Umbu Mamijuk, Sumba Tengah.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6:3, 2024.

Siborutorop, J. “Analysis of Indonesia’s National Food Estate Programme from a Food Sovereignty-based Perspective.” *Indonesian Journal of Politics*, 9:2, 2023.

Tohari, Amin. “Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) di Papua.” *Jurnal Bhumi*, 37, April 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*.

-----, *UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

-----, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010*.

-----, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate..*

-----, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan*.

-----, *Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah*.

-----, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan*.

-----, *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*.

-----, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

-----, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Internet

Adiningsih, Y. "Masyarakat Adat di Merauke Tersingkir Proyek Tebu dan Bioetanol, Transisi Energi Berkeadilan?" *Mongabay*, 28 Juni 2025. <https://mongabay.co.id/2025/06/28/masyarakat-adat-di-merauke-tersingkir-proyek-tebu-dan-bioetanol-transisi-energi-berkeadilan>, diakses pada 17 November 2025.

Ama, Kornelis Kewa. "Lahan "Food Estate" di Sumba Tengah Kesulitan Air." *Kompas.id*, 5 Juni 2021. <https://www.kompas.id/artikel/lahan-food-estate-di-sumba-tengah-kesulitan-air>, diakses pada 16 November 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Evaluasi UU PPLH: Bagaimana UU Cipta Kerja Mengubah Aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?" *BPHN*, 8 Juli 2024. <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-uu-pplh-bagaimana-uu-cipta-kerja-mengubah-aturan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada 23 Maret 2025.

Chen, James. "Agribusiness: Definition, Challenges, and Market Forces Explained." *Investopedia*, 23 Agustus 2025. <https://www.investopedia.com/terms/a/agribusiness.asp>, diakses pada 11 Oktober 2025.

Cullen, Maximo Torero. "COVID-19 and The Risk to Food Supply Chains: How to Respond?" *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, 29 Maret 2020. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/71364d69-c916-425f-8ee4-8fff23230a41/content>, diakses pada 31 Oktober 2025.

Duangbootsee, Uchook. "Thailand's Large-Scale Farming Model: Problems and Concerns." *Food and Fertilizer Technology Center Agricultural Policy Platform*, 30 Oktober 2018. <https://ap.ffa.org.tw/article/1347>, diakses pada 11 Oktober 2025.

- Fitra, Syahrul. "Lumbung Pangan ala Jokowi Bagi Buah Simalakamah." *Greenpeace Indonesia*, 8 Desember 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44440/lumbung-pangan-ala-jokowi-bagai-buah-simalakama>, diakses pada 16 November 2025.
- Forest Peoples Programme. "Press Release-Starvation and Poverty in Indonesia: Civil Society Organisations Appeal for Suspension of MIFEE Project in Papua Pending Redress for Local Communities." *Forest People Programme*, 23 Agustus 2013. <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/press-releases/article/press-release-starvation-and-poverty-in-indonesia-civil-society-organisations-appeal-for-suspension-of-miffee-project-in-papua-pending-redress-for-local-communities/>, diakses pada 22 Oktober 2025.
- Forest Watch Indonesia. "Indonesia Perparah Krisis Iklim Akibat Food estate Merauke." *FWI*, 9 Desember 2021. <https://fwi.or.id/indonesia-perparah-krisis-iklim-akibat-food-estate>, diakses pada 14 November 2025.
- Ginanjari, Raden Putri Alpadillah. "4 Orang Terdekat Haji Isam yang jadi Menteri di Kabinet Prabowo." *Tempo.co*, 23 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/4-orang-terdekat-haji-isam-yang-jadi-menteri-di-kabinet-prabowo-1096628>, diakses pada 20 Maret 2026.
- Hidayat, Avit. "Berbagi Konsesi Tebu di Lumbung Pangan Merauke." *Tempo.co*, 24 September 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/pemegang-konsesi-tebu-food-estate--391339>, diakses pada 14 November 2025.
- Jong, Hans Nicholas. "Indonesia's plantation program on collision course with wildlife, Indigenous groups." *Mongabay*, 6 January 2021. <https://news.mongabay.com/2021/01/indonesia-food-estate-program-wildlife-indigenous-groups>, diakses pada 14 November 2025.
- ". "Indonesian program's promise of food security backfires for local farmers." *Mongabay*, 8 March 2022. <https://news.mongabay.com/2022/03/indonesian-programs-promise-of-food-security-backfires-for-local-farmers/>, diakses pada 22 November 2025.

- Kemensetneg. “Lumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT.” *Kemensetneg*, 23 Februari 2021. https://www.setneg.go.id/baca/index/lumbung_pangan_untuk_kesejahteraan_masyarakat_ntt, diakses pada 16 November 2025.
- Khairunisa. “Food Estate Project in Central Kalimantan Could Lead to Long-Term Ecological Damage - Green Network Asia.” *Green Network Asia*. <https://greennetwork.asia/featured/food-estate-project-in-central-kalimantan-could-lead-to-long-term-ecological-damage/>, diakses pada 22 November 2025.
- Korab-Karpowicz, W. Julian. “Political Realism in International Relations.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations>, diakses pada 9 Oktober 2025.
- Media Indonesia. “Penjelasan KLHK tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Food estate.” *Media Indonesia*, 16 Oktober 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/361401/penjelasan-klhk-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-food-estate>, diakses pada 8 November 2025.
- Moiwend, Rosa Biwangko Gebze. “A Small Paradise That Will Be Annihilated: View from Merauke, West Papua.” *Farmlandgrab.org*, 31 Agustus 2010, <https://www.farmlandgrab.org/post/15350-a-small-paradise-that-will-be-annihilated-view-from-merauke-west-papua>, diakses pada 31 Oktober 2025.
- Nurita, Dewi. “Program Food Estate, Menhan Prabowo Mulai Tanam Singkong Pada 2021.” *Tempo.co*, 23 September 2020. <https://www.tempo.co/politik/program-food-estate-menhan-prabowo-mulai-tanam-singkong-pada-2021-579679>, diakses pada 12 November 2025.
- PANRB. “Perkuat Reformasi Regulasi dengan UU Cipta Kerja.” *PANRB*, 22 Oktober 2020, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja>, diakses pada 4 November 2025.

- Pantau Gambut. "Food estate, #Kenapa Buru-buru?" *Pantau Gambut*, 9 November 2021 <https://pantaugambut.id/publikasi/program-food-estate-baru-kenapa-buru-buru>, diakses pada 1 November 2025.
- Pebrianto, Fajar. "Ketua MPR Singgung Peringatan FAO soal Pangan, Jokowi Bicara Food Estate." *Tempo.co*, 14 Agustus 2020. <https://www.tempo.co/ekonomi/ketua-mpr-singgung-peringatan-fao-soal-pangan-jokowi-bicara-food-estate-592014>, diakses pada 29 April 2025.
- Rosana, Francisca Christy. "Ekspansi Politik Haji Isam setelah Masuk Lingkaran Prabowo." *Tempo.co*, 25 Mei 2025. <https://www.tempo.co/politik/jaringan-politik-haji-isam-1543248>, diakses pada 20 Maret 2026.
- Sekretariat Kabinet. "Gov't to Develop Food estate Area in North Sumatra Province." *Setkab*, October 27, 2020, <https://setkab.go.id/en/govt-to-develop-food-estate-area-in-north-sumatra-province/>, diakses pada 14 November 2025.
- . "South Papua to be National Food estate in Eastern Indonesia." *Setkab*, 30 November 2022. <https://setkab.go.id/en/south-papua-to-be-national-food-estate-in-eastern-indonesia>, diakses pada 14 November 2025.
- . "Presiden Jokowi: Food Estate Program Kolaborasi untuk Antisipasi Krisis Pangan." *Setkab*, 18 Agustus 2023, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-food-estate-program-kolaborasi-untuk-antisipasi-krisis-pangan/>, diakses pada 20 November 2025.
- . "Presiden: Pengembangan Food Estate di Kalteng Gunakan Teknologi Modern." *Setkab*, 8 Oktober 2020, <https://setkab.go.id/presiden-pengembangan-food-estate-di-kalteng-gunakan-teknologi-modern/>, diakses pada 1 November 2025.
- Shabrina, Dinda. "Outlook 2025: Konflik PSN dan Masyarakat Adat Diprediksi Memburuk." *Tempo.co*, 20 Januari 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/outlook-2025-konflik-psn-dan->

masyarakat-adat-diprediksi-memburuk-1196427 diakses pada 16 April 2025.

Sulistiyowati, Retno. "End of Journey for Kurik's Corn." *Tempo.co*, 11 Agustus 2020. <https://magz.tempo.co/read/cover-story/36946/end-of-journey-for-kuriks-corn>, diakses pada 22 Oktober 2025.

Tempo. "Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi." *Tempo.co*, 23 September 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-perusahaan-penggarap-proyek-food-estate-merauke-jokowi-5855>, diakses pada 20 November 2025.

-----". "Jokowi Beri Tugas Prabowo Tanam Singkong di Lahan 30 Ribu Hektare." *Tempo.co*, 24 September 2020. <https://www.tempo.co/ekonomi/jokowi-beri-tugas-prabowo-tanam-singkong-di-lahan-30-ribu-hektare-579304>, diakses pada 20 November 2025.

-----". "Kegagalan Proyek Food Estate Singkong Prabowo Subianto, Merusak Hutan dan Sia-sia." *Tempo.co*, 12 Januari 2024. <https://www.tempo.co/arsip/kegagalan-proyek-food-estate-singkong-prabowo-subianto-merusak-hutan-dan-sia-sia-98823>, diakses pada 22 November 2025.

-----". "Politik 'Tanah Kosong' di Papua." *Tempo.co*, 12 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/kolom/konflik-lahan-proyek-pangan-papua-2078725>, diakses pada 14 November 2025.

-----". "Setelah Food Estate Gagal Total." *Tempo.co*, 12 Januari 2025. <https://www.tempo.co/kolom/food-estate-sumatera-utara-1192925>, diakses pada 5 Maret 2026.

The Gecko Project. "Fear and Raiders in Papua: How thousands of Indonesian soldiers are forcing through a vast agricultural project in indigenous lands and forests." *Gecko Project*, 14 February 2025. <https://thegeckoproject.org/id/articles/fear-and-raiders-in-west-papua/>, diakses pada 20 November 2025.

Triwibowo, Dionisius Reynaldo. “”Food Estate” Dinilai Tabrak Beragam Kajian Hukum.” *Kompas.id*, 31 Maret 2021.

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/31/food-estate-dinilai-tabrak-beragam-kajian-hukum?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 16 April 2025.

----- “Janji Usang Lambung Pangan.” *Kompas.id*, 25 Oktober 2020. <https://www-beta.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/25/janji-usang-lambung-pangan/>,

diakses pada 16 April 2025.

WW, Karana. “Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, Gagal.” *Tempo.co*, 8 Oktober 2003. <https://www.tempo.co/arsip/proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar-gagal-2030619>, diakses pada 16 Oktober 2025.